



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
KECAMATAN PANTAI BARU
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pada tempat yang utama, patutlah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tuntunan dan penyertaanNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pantai Baru yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan Daerah, Renja Perangkat Daerah sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Kecamatan Pantai Baru pada khususnya dan Kabupaten Rote Ndao pada umumnya.

Olafuliha'a, 19 Juli 2024
Camat Pantai Baru,



Micha Manubulu, S.Pi
Penata Tk. I
NIP. 19731212 200604 1 020

i
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian	
Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Tahun 2025-2026. Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 151 ayat (2) menyatakan Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Kecamatan Pantai Baru Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, alat untuk menjamin kesesuaian antara matrik program dan kegiatan pada Renja dengan yang tercantum dalam RKPD serta alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Kecamatan Pantai Baru disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang baik, handal, dan prima melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Pantai Baru.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber

daya lainnya.

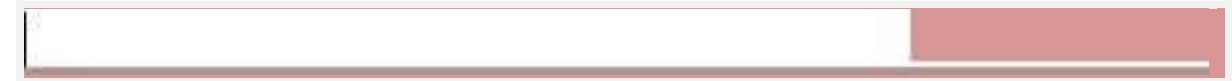
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan, dengan Renja Provinsi/Kabupaten. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landaan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022- 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53 – 8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Tengah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Nomor 0011);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2024;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
25. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
26. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
27. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai penjabaran dari Renstra Kabupaten Rote Ndao, penyusunan Rancangan Akhir

Rencana Kerja Kecamatan Pantai Baru dimaksudkan untuk menetapkan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025;
- b. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
- c. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju, serta lokasi yang telah ditetapkan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pantai ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkand engan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, IKK.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Riwew terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel 3.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaanm usrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 4.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran terget kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan Mengenai:

1. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,
- g. Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pantai Baru

Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Rote Ndao. sebagaimana Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%). Kecuali pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditiadakan karena refocusing anggaran akibat pandemi Covid19.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, semua program kegiatan telaksana sesuai target yang ditentukan meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2023.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.



Target capaian program Renstra tahun 2019 – 2024 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

- 5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2024 disajikan pada tabel 1. berikut :

--	--

Tabel 1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PANTAI BARU S/D TAHUN 2024 KABUPATEN ROTE NDAO

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023			TARGE RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023	REALISASI RENJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10 / 4)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	300	100
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100			
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100	100			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perubahan Renstra, Renja PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12 Dok	12 dok					24	100
1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dok		12 Dok	12	100	12 Dok	24	100
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja Per triwulan	7 laporan	7 laporan					7	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 laporan		7 laporan	7	100	7 laporan	14	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah	83 Org/Bln	27 Org/Bln	28 Org/Bln	28	100	Org/Bln	83	100
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	27 Org/Bln	27 Org/Bln					27	100
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 org/bln		28 Org/Bln	28	100	28 Org/Bln	56	100

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelola APBD	4 Org/Bln	4 Org/Bln					4	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	2 Dok	1 Org/Bln	1 Dok	1	100	1 Dok	2	100

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	2 Org/Bln	2 Org/Bln					2	100
3		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok		1 Dok	1	100	1 Dok	2	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa addministrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	2 Org/Bln	Org/Bln					0	0
3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	2 Org/Bln	2 Org/Bln					2	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	1	100	1 Paket	2	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit	1 Unit					1	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1	100	1 Paket	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		3 Paket	3	100	3 Paket	6	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	32 Buku	32 Buku					32	100
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2	100	2 Paket	4	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	14 Kali	14 Kali					14	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2	100	2 Laporan	4	100
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	200 Lembar	200 Lembar					200	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan					12	100

5		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	1	100	1 Laporan	2	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan					12	100
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		5 Unit	5	100	5 Unit	10	100
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit					5	100

		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	10 Unit		5 Unit	5	100	5 Unit	10	100
17	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi								
18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor								
	PROGRAM PENIGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYRAKATAN	CAKUPAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	PRESENTASE PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 laporan		2 laporan	2	100	2 laporan	4	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terleksananya pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		jumlah pembinaan PKK dan DWP Kecamatan	14 Lembaga		7 Lembaga	7	100	14 Lembaga	14	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi kelurahan	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya dana operasional bagi Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan					12	100
		jumlah laporan dana operasional bagi Kelurahan	24 laporan		12 laporan	12	100	12	24	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	24 bulan	12 bulan					24	100
		jumlah sarana dan prasarana kelurahan	2 Unit	2 unit	1 unit	1	1	1 lembaga	2	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100	12 unit	12	100
		Jmlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	2 unit	2 unit	2 unit	2	100	1 unit	2	100
	Evaluasi Kelurahan	Tersedianya Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring	12 bulan	12 bulan					12	100
13		jumlah Operasional Kelurahan untuk evaluasi dan monitoring	24 laporan		12 Bulan	12	100	12	24	100
		terlaksananya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat								
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordiansi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
		presentase Koordiansi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselesaikannya Penanganan Pengaduan Masyarakat	24 Bulan	24 Bulan					24	100
		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 Laporan		2 laporan	2	100	2 Laporan	4	100
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaranaan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Diklat Pasukan Pengibar Bendera	12 Bulan	12 bulan					12	100
30		Jumlah Diklat Pasukan Pengibar Bendera	50 Orang		25 Org	25	100	25	50	100
			100 %	100 %	100 %	100	100	100 %	100	100



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja Kecamatan Pantai Baru berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Kecamatan Pantai Baru yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pantai Baru dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pantai Baru dapat dilihat pada tabel berikut :

--	--

--	--

RANHIR KECAMATAN
PANTAI BARU 2025

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC.PANTAI BARU KAB. ROTE NDAO TAHUN 2023-2026

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	TARGET IKU	TARGET IKK	TARGET RENSTRA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata - rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)				0	78,14	80	82	84
2	Prensetasi penyelesaian pengaduan masyarakat				100	100	100	100	100
3	Presentasi Desa yang yang tertib pengelolaan Administrasi				N/A	N/A	N/A	100	100
4	Presentasi lembaga kemasyarakatan aktif yang mendapatkan pembinaan				N/A	N/A	N/A	100	100



RANHIR KECAMATAN
PANTAI BARU 2025



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pantai Baru merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, terdapat isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pantai Baru pada tahun 2024 yaitu :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pantai Baru dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme Aparatur dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, didukung dengan sarana infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum tersedia dalam kondisi baik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Pantai Baru :
 - a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan menginginkan akses pelayanan publik yang mudah, transparan dan nyaman melalui penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK).
 - b. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Tuntutan Pemberdayaan Masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan penunjang ekonomi rakyat.
 - d. Perkembangan Iptek yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
 - e. Belum semuanya terpenuhi usulan- usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Pantai Baru, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Rote Ndao;
 - f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - g. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Pantai Baru.
 - h. Rendahnya keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan dan perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - i. Adanya tuntutan pembangunan, pelayanan Kecamatan Ramah Anak dan fasilitas untuk disabilitas.

- j. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program-program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
- Tantangan :
- a. Kecamatan Pantai Baru dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pelayanan di Kecamatan Pantai Baru.
 - b. Aparatur Kecamatan Lobalain dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
 - c. Lebih Intensif untuk menyatukan persepsi antara Aparatur pemerintah dan masyarakat guna tersalurnya aspirasi serta tercapainya pembangunan secara menyeluruh.
- Peluang :
- a. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada ;
 - b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada;
 - c. Melakukan evaluasi secara rutin kepada setiap aparatur, mengenai prosedur pelayanan sesuai SOP;
 - d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan melalui anggaran operasional Kecamatan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 yang direncanakan adalah : a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Desa, □ Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkesinambungan.

c. Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

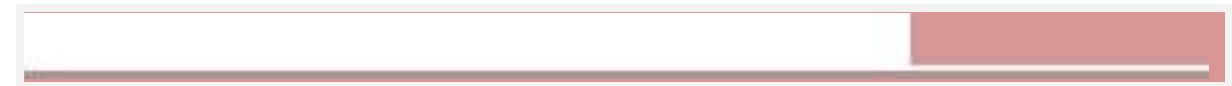
Kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Tujuan dilaksanakannya Program/kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja tahun 2024.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat



bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

- 4. Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Pantai Baru lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 di bawah ini :

--	--

Tabel 3.

Review Rancangan Awal RKPD Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100 %	1.910.502.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100 %	1.910.502.000
		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100 %			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	
		Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100 %			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100 %	
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kec. Panbar)	15 Dokumen	52.064.903	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	(Kec. Panbar)	15 Dokumen	52.064.903

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	10 Dokumen	50.150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	10 Dokumen	50.150.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	5 Laporan	1.914.903	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	5 Laporan	1.914.903

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kec. Panbar)	100 %	1.750.147.097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	(Kec. Panbar)	100 %	1.750.147.097
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kec. Panbar)	48 Org/Bln	1.706.667.097	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Kec. Panbar)	48 Org/Bln	1.706.667.097
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kec. Panbar)	1 Dokumen	43.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kec. Panbar)	1 Dokumen	43.480.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kec. Panbar)	100 %	11.520.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	(Kec. Panbar)	100 %	11.520.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kec. Panbar)	1 Dokumen	11.520.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	(Kec. Panbar)	1 Dokumen	11.520.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	100 %	58.550.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	(Kec. Panbar)	100 %	58.550.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	14.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	14.000.000

	Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kantor				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	15.492.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	15.492.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	10.950.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Paket	10.950.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kec. Panbar)	10 Laporan	15.108.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kec. Panbar)	10 Laporan	15.108.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kec. Panbar)	100 %	14.120.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Kec. Panbar)	100 %	14.120.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Laporan	14.120.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Kec. Panbar)	1 Laporan	14.120.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presntasi barang milik daerah yang terpelihara	(Kec. Panbar)	100 %	24.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	(Kec. Panbar)	100 %	24.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kec. Panbar)	5 Unit	24.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Kec. Panbar)	5 Unit	24.100.000

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kec. Panbar	100	%	26.720.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kec. Panbar	100	%	26.720.000
			Kec. Panbar						Kec. Panbar			
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penugasan	Kec. Panbar	100	%	26.272.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen penugasan	Kec. Panbar	100	%	26.272.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kec. Panbar	1	Paket	26.272.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi	Kec. Panbar	1	Paket	26.272.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	(Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panbar)	100	%	551.307.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	(Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panbar)	100	%	551.307.000
	10 Koordinasi Pemberdayaan Desa	Presentasi Pemberdayaan Desa	(Kec. Panbar)	100	%	283.507.000	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Presentasi Pemberdayaan Desa	(Kec. Panbar)	100	%	283.507.000

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat	(Kec. Panbar)	18	Usulan	233.507.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat	(Kec. Panbar)	18	Usulan	233.507.000
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah PKK dan Dharma wanita yang mendapat pembinaan	(Kec. Panbar)	45	Org	50.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah PKK dan Dharma wanita yang mendapat pembinaan	(Kec. Panbar)	45	Org	50.000.000

	Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	(Kec. Panbar)	100 %	267.800.000	Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	(Kec. Panbar)	100 %	267.800.000
	Pemberdayaan Kelurahan Olafulihaa	Jumlah pelayanan kelembagaan	Kelurahan Olafulihaa	5 Lembaga	267.800.000	Pemberdayaan Kelurahan Olafulihaa	Jumlah pelayanan kelembagaan	Kelurahan Olafulihaa	5 Lembaga	267.800.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pantai Baru	100 %	6.783.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pantai Baru	100 %	6.783.000
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kec. Panbar)	100 %	6.783.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(Kec. Panbar)	100 %	6.783.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	(Kec. Panbar)	12 Laporan	6.783.000		Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	(Kec. Panbar)	12 Laporan	6.783.000
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panbar	100 %	15.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panbar	100 %	15.000.000

16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panbar	100 %	15.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panbar	100 %	15.000.000
	Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panbar	18 Dokumen	15.000.000	Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Faslitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panbar	18 Dokumen	15.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pantai Baru mengacu pada Renstra Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 - 2026 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif, Kecamatan Pantai Baru juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

Selain berdasarkan pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Renja Kecamatan Pantai Baru juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dalam musrenbang desa dan kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Rote Ndao.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Keluaran yang dihasilkan proses Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbangcam dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tersebut dengan dilampiri :

7. Daftar hadir musrenbang kecamatan.
8. Daftar usulan prioritas program, kegiatan dan anggaran.

RANHIR KECAMATAN PANTAI BARU 2025

2. Penetapan delegasi peserta yang dipilih untuk mewakili kecamatan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Penelaahan terhadap program-program prioritas usulan masyarakat ini tersusun dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Pantai Baru untuk selanjutnya usulan tersebut dibahas pada Forum Gabungan Tingkat Kabupaten untuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Sehubungan dengan belum dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten maka belum ada program-program prioritas usulan masyarakat yang disajikan.

--	--

RANHIR KECAMATAN PANTAI BARU 2025

Tabel 4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01				PERENCANAAN			1.928.424.000				1.928.424.000
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	1.928.424.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.928.424.000
						Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %	
						Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %	
						Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %	
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	15 Dokumen	52.064.903	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	52.064.903
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50.150.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	50.150.000
		01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.914.903	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Laporan	1.914.903

5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.750.497.097	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.750.497.097
---	----	----	------	--	--	--	-------	---------------	---------------	--	-------	---------------

5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Org/bulan	1.706.667.097	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 0org/bulan	1.706.667.097
5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	43.830.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	43.830.000
5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	11.520.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	11.520.000
5	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.520.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11.520.000
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	58.550.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	58.550.000
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.000.000
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	14.000.000
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.492.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.492.000
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.950.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.950.000

5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15.108.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Laporan	15.108.000
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.770.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	13.770.000
5	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	13.770.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	13.770.000
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.620.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	16.620.000
5	01	01	2,08	01	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.500.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	2.500.000

5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.120.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 laporan	14.120.000
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39.172.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	39.172.000
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24.100.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	24.100.000
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	5.072.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	5.072.000

5	01	01	2,09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kantor dan Rumah Jabatan)	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 unit	10.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	10.000.000
5	01	01	2,09	09	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	26.720.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	26.720.000
5	01	02								Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		
						Jumlah dokumen penugasan	100 %	26.720.000			100 %	26.720.000
5	01	02	2,01			Jumlah koordinasi	1 Paket	26.720.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	26.720.000
5	01	02	2,01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	551.307.000	(Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panbar) (Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	551.307.000
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Presentasi Pemberdayaan Desa	100 %	283.507.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	283.507.000
5	01	02	2,03		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat	18 Usulan	233.507.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Usulan	233.507.000
5	01	02	2,03	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah PKK dan Dharma wanita yang mendapat pembinaan	45 Org	50.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 Org	50.000.000
5	01	02	2,04		Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	100 %	267.800.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	267.800.000

5	01	02	2,04		Pemberdayaan Kelurahan Olafulihaa	Jumlah pelayanan kelembagaan	5 Lembaga	267.800.000	Kelurahan Olafulihaa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 lembaga	267.800.000
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	6.783.000	Kecamatan Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	6.783.000
5	01	03	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	6.783.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	6.783.000
5	01	03	2,01	02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan	6.783.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 laporan	6.783.000
5	01	03	2,01	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	15.000.000
5	01	03	2,01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	15.000.000
5	01	03	2,01	08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	15.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao merupakan bagian dari sistim perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan provinsi serta sistim perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pantai Baru bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Propvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025- 2026.

Terkait dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao selaku Lembaga Teknis Daerah dan juga Unsur Penunjang Pemerintah Daerah masuk dalam prioritas nasional 1 (satu) yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Penataan kelembagaan desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

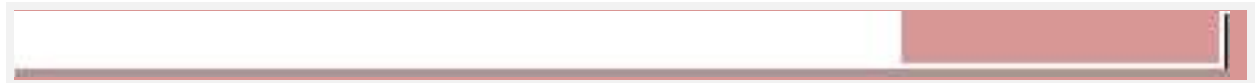
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pantai Baru sebagai berikut :

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 20252026, yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima*** dengan tujuan ***Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik*** serta sasaran yaitu ***Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik*** yang ukuran indikatornya adalah ***Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)***. Dengan indikatornya adalah :

1. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif;



RANHIR KECAMATAN PANTAI BARU 2025

4. Persentase Desa yang tertib pengelolaan administrasi desa.

.3.3 Program dan Kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 adalah 5 Program dengan 11 Kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pantai Baru sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pantai Baru dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Kebutuhan dana/pagu yang dibutuhkan sebesar Rp. 2.242.512.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten sebesar Rp.

1.910.502.000,-

- Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan sebesar Rp. . 283.507.000,-

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 6.783.000,- - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 26.720.000.-

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 15.000.000.-

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
Tidak ada Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

--	--

Tabel 5

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao

KODE REK					PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	01				PERENCANAAN			1.928.424.000				1.928.424.000
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100 %	1.928.424.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.928.424.000
						Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				100 %	
						Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %				100 %	
						Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %				100 %	
5	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	15 Dokumen	52.064.903	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Dokumen	52.064.903
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50.150.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	50.150.000
		01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.914.903	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Laporan	1.914.903

5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.750.497.097	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	1.750.497.097
---	----	----	------	--	--	--	-------	---------------	---------------	--	-------	---------------

5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Org/bulan	1.706.667.097	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	48 0org/bulan	1.706.667.097
5	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	43.830.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	43.830.000
5	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	11.520.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	11.520.000
5	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.520.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11.520.000
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	58.550.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	58.550.000
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	3.000.000
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	14.000.000
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.492.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	15.492.000
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.950.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.950.000

5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15.108.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Laporan	15.108.000
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.770.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	13.770.000
5	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	13.770.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	13.770.000
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.620.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	16.620.000
5	01	01	2,08	01	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.500.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 bulan	2.500.000

5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.120.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 laporan	14.120.000
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39.172.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	39.172.000
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24.100.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 Unit	24.100.000
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	5.072.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	5.072.000
5	01	01	2,09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kantor dan Rumah	Jumlah Gedung yang Dipelihara	2 unit	10.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 unit	10.000.000

RANHIR KECAMATAN
PANTAI BARU 2025

					Jabatan)							
5	01	01	2,09	09	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	26.720.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	26.720.000
5	01	02				Jumlah dokumen penugasan	100 %	26.720.000		Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %
5	01	02	2,01			Jumlah koordinasi	1 Paket	26.720.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	26.720.000
5	01	02	2,01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100 %	551.307.000	(Desa dan Kelurahan di Kecamatan Panbar) (Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Pemberdayaan Desa	Presentasi Pemberdayaan Desa	100 %	283.507.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 %	283.507.000
5	01	02	2,03		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pemabangunan di Desa	Jumlah Usulan masyarakat	18 Usulan	233.507.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Usulan	233.507.000
5	01	02	2,03	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah PKK dan Dharma wanita yang mendapat pembinaan	45 Org	50.000.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	45 Org	50.000.000
5	01	02	2,04		Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Presentasi Pemberdayaan Kelurahan	100 %	267.800.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	267.800.000
5	01	02	2,04		Pemberdayaan Kelurahan Olafulihaa	Jumlah pelayanan kelembagaan	5 Lembaga	267.800.000	Kelurahan Olafulihaa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 lembaga	267.800.000
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %	6.783.000	Kecamatan Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	6.783.000

RANHIR KECAMATAN
PANTAI BARU 2025

5	01	03	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	6.783.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	6.783.000
5	01	03	2,01	02	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan	6.783.000	(Kec. Panbar)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 laporan	6.783.000
5	01	03	2,01	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	15.000.000
5	01	03	2,01	06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	100 %	15.000.000
5	01	03	2,01	08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	15.000.000	Kec. Panbar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 Dokumen	15.000.000

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025-2026 dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Pantai Baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan yaitu pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang ditetapkan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Kecamatan Pantai Baru berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

- Kecamatan Pantai Baru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pantai Bau Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025.

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Pantai baru pada tahun mendatang akan menetapkan 5 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pantai baruselain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pantai Baru. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Di samping itu Rancangan Akhir Renja Kantor Kecamatan Pantai Bau juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pantai Baru Tahun 2025 ini dapat kami sampaikan, semoga keberadaan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pantai Baru ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pantai serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

Olafuliha'a, 19 Juli 2024
Camat Pantai Baru,



Micha Manubulu, S. Pi
Penata Tingkat I
NIP.19731212 200604 1 020